



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zaenal, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Afifah, Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anggara, dkk, 2014, *Naskah Akademik dan Rencana Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Prpaeradilan*, ICJR.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Danil, H. Elwil dan Shidarta, 2015, *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum, Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farida, Maria, dkk, 2008, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta.



Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

_____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2014, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Loqman, Loebby, 1987, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lubis, Solly, 1989, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

M. D., Moh. Mahfud, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

Marbun, S. F., 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Muliadi, Ahmad, 2014, *Politik Hukum*, Akademia, Padang.

Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.

Prakoso, Djoko, 1988, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeparmono, R, 2015, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.



Syaukani, Imam, dan A. Ahsan Thohari, 2005, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tanusubroto, S., 1983, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.

Warsito, Iwan Anggoro, 2015, *Pemeriksaan Pendahuluan dan Praperadilan*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.

Wisnubroto, Al. dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772)



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596)

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2012 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2012 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

C. Penelitian

Mohammad Mahfud M.D., 1993, *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suhariyono, 2009, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.

D. Artikel Jurnal

Amir Syarifuddin, 2017, *Putusan MK dalam Penegakan Hukum Korupsi*, Kompas, 2 Februari 2017.

Heru Iriani, 2013, *Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan*, Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta.

Jan S. Maringka, 2015, *Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis*, Jurnal Peradilan Indonesia, Vol. 3, Juli-Desember 2015.

Luhut M. Pangaribuan, 2014, *Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Teropong, Vol. 1, Agustus 2014.

Malik, 2009, “*Telaah Makna Putusan MK yang Final dan Mengikat*”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April 2009.

Miko Ginting, 2015, *Evaluasi terhadap Pembaharuan RKUHAP*, Jurnal Peradilan Indonesia, Vol. 3, Juli-Desember 2015.



Nefa Claudia Meliala, 2013, *Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai Pengganti Praperadilan*, Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta.

R.M. Haka Astana M. Widya, 2013, *Praperadilan dan Hakim Komisaris*, Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, perihal pengujian Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 1 Mei 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, perihal pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 16 Maret 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, perihal pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 25 Januari 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Pemohon R.J. Lino, tanggal 26 Januari 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN.Yyk atas nama Pemohon Tri Murti dan Suprpto, tanggal 8 Maret 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pra.Per/2016/PN.Sby atas nama Pemohon Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti, tanggal 12 April 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN.Wat atas nama Pemohon Suharno als Harno bin Suwito, tanggal 31 Oktober 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN.Dps atas nama Pemohon I Made Sudira, tanggal 28 November 2016.



F. Sumber Internet

Berita Satu, “ICJR Apresiasi Putusan MK yang Memperluas Objek Praperadilan”,
<http://www.beritasatu.com/nasional/269415-icjr-apresiasi-putusan-mk-yang-memperluas-objek-praperadilan.html>, diakses 9 Januari 2017.

CNN Indonesia, “Banjir Praperadilan Seperti Membuka Kotak Pandora”,
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150330180531-12-43060/banjir-praperadilan-seperti-membuka-kotak-pandora/>, diakses pada 5 Januari 2017.

DPR, “Prolegnas 2015-2019”, <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, diakses 17 Februari 2017.

Eddy O.S. Hiariej, “Menyandera dengan Status Tersangka”,
<http://nasional.kompas.com/read/2015/01/21/14130431/Menyandera.dengan.Status.Tersangka>, diakses 1 Februari 2017.

Lilik Mulyadi, “Sistem Hukum Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Yurisprudensi dan Pergeseran Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia” http://www.badilum.info/upload_file/img/article/doc/sistem_hukum_pemeriksaan_perkara_tindak_pidana_korupsi.pdf, diakses 11 April 2017.

Hukum Online, “Begini Alasan MK Ubah Delik Tipikor”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor>, diakses pada 12 Maret 2017.

Kompas, “Tanda Tanya di Balik Putusan Hakim Sarpin”,
<http://nasional.kompas.com/read/2015/02/17/08532481/Tanda-Tanya-di-Balik-Putusan-Hakim-Sarpin>, diakses 5 Januari 2017.